

TATA TERTIB SEKOLAH FOLK ARTS-CULTURAL TREASURES CHARTER KHAZANAH BUDAYA - KESENIAN RAKYAT

“Memberikan suatu arti kehidupan bagi anak-anak kita saat ini sambil menyiapkan mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat yang demokratis.”

-Grace Lee Boggs

Sekolah FACTS menyediakan pendidikan teladan bagi para siswa dengan menggunakan budaya dan kesenian tradisional yang terdapat dalam komunitas mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya sebagai katalisator bagi penyelidikan kritis dan keterlibatan mereka dalam bermasyarakat.

Bertempat di dalam komunitas Chinatown Philadelphia, FACTS akan memberikan anak-anak dengan pendidikan yang mempunyai standar akademis yang tinggi, semua tergantung pada tempat komunitas, berbaur dan menghormati kehidupan murid-murid dan keluarga mereka, melibatkan murid untuk mengerti kebudayaan mereka dan komunitas, dan melibatkan murid-murid supaya mereka mengerti peranan mereka sebagai partisipan dalam bekerja untuk menuju ke masyarakat yang adil.

-Pernyataan Misi dan Visi Sekolah FACTS

Kontrak Orang Tua/Siswa/Sekolah FACTS

Keberhasilan sekolah bergantung pada dukungan setiap anggota komunitas sekolah. Bekerja sama, dosen dan staf, orang tua dan siswa dapat meningkatkan prestasi akademik dan karakter yang baik serta memastikan keberhasilan siswa di sekolah dan sepanjang hidup. Atas nama administrasi, manajemen, dan staf sekolah, saya berjanji untuk memenuhi tanggung jawab saya dan menjunjung tinggi harapan yang tercantum dalam ikrar sekolah kami.

Pheng Lim

Kepala Sekolah

Tanda tangan Anda di tempat yang sesuai di bawah ini menunjukkan komitmen Anda untuk membantu memenuhi misi sekolah.

Sebagai orang tua dari _____, saya berjanji:

- untuk mempertahankan harapan yang tinggi bagi anak saya dan sekolah
- untuk menunjukkan perhatian yang konsisten terhadap perkembangan anak saya di sekolah
- untuk mendukung upaya terbaik anak saya
- untuk mendukung dan bekerja sama dengan staf sekolah dalam meningkatkan pembelajaran anak saya.

Saya telah membaca Kode Etik dan mendukung aturan serta harapan yang diuraikan di sini.

Tanda Tangan _____

Nama dengan huruf cetak: _____

Tanggal: _____

Sebagai siswa Sekolah Carter FACTS, Saya berjanji untuk:

- Bertanggung jawab
- Bersikap tegas
- Menghormati diri sendiri dan orang lain
- Berbudi baik
- Bicara dan mencari yang benar
- Menjadi warga yang baik
- Memperlihatkan keberanian
- Menerapkan disiplin-diri
- Bersikap adil
- Menerima dan belajar dari konsekuensi perilaku yang tidak layak.

Tanda tangan _____

Nama dengan huruf cetak: _____

Daftar Isi

Kontrak Orang Tua/Siswa/Sekolah FACTS.....	2
Sumpah Sekolah Carter FACT.....	4
Ruang Lingkup Tata Tertib Siswa FACTS.....	4
Peran Personalia Sekolah, Siswa, dan Orang Tua.....	5
Tindakan Layak dan Perilaku yang Dikehendaki.....	6
Iklim Sekolah Positif.....	8
Tindakan Tak Layak atau Perilaku yang Tak Diterima.....	9
Grafik Disipliner di Tingkat-Sekolah.....	11
Penahanan, Penangguhan dan Pengeluaran.....	14
Prosedur Banding.....	19
Disiplin bagi Siswa Berkebutuhan Khusus.....	21
Melaporkan Kejahatan dan/atau Perilaku Yang Mengganggu.....	23
Kebijakan Tidak Hadir.....	23
Anti Penindasan Kebijakan.....	24

Sumpah Sekolah Carter FACT

- Kami peduli satu sama lain dan belajar bersama.
- Kami tidak mengenal batas untuk apa yang bisa kami pelajari.
- Keluarga dan generasi tua dalam masyarakat kami tahu tentang banyak hal penting dan kami perlu banyak belajar dari mereka.
- Kami belajar untuk menolong diri sendiri dan masyarakat kami.
- Kami belajar agar menjadi kuat dan bertindak dengan berani.
- Semua orang berhak menggunakan bahasa sendiri dan menghormati kebudayaan mereka.
- Ungkapan kreatif adalah bagian kehidupan kami dan bagian dari sekolah kami.
- Kami berkarya untuk membangun suatu dunia yang adil dan damai.
- Bumi adalah rumah kami dan kami wajib merawatnya.

Ruang Lingkup Tata Tertib Siswa FACTS

Tata Tertib ini berlaku untuk tindakan para siswa FACTS yang terjadi:

- Kapan saja di lingkungan sekolah;
- Di luar lingkungan sekolah pada saat ada kegiatan, upacara atau acara yang berhubungan dengan sekolah;
- Di luar lingkungan sekolah ketika tindakan tersebut secara nalar mungkin bisa (i) merongrong wibawa sekolah; (ii) membahayakan keamanan para siswa, guru, administrator, atau anggota lain dari komunitas sekolah; atau (iii) mengganggu sekolah; dan
- Selagi dalam perjalanan menuju atau pulang dari sekolah dalam bis atau kendaraan sekolah, terlepas dari sekolah yang mana atau perusahaan pemilik kendaraan itu, ataupun ketika menggunakan kendaraan umum.

Peran Personalia Sekolah, Siswa, dan Orang Tua

Kode Etik FACTS mengakui perlunya hubungan kerjasama antara siswa, orang tua, dan pendidik. Agar hubungan ini berhasil, FACTS membutuhkan dan mengharapkan:

Staf sekolah untuk:

- Menggunakan prosedur bimbingan yang konsisten dan penuh kasih sayang.
- Membantu menjaga suasana yang kondusif untuk perilaku yang baik.
- Membantu siswa menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan penuh kasih sayang.
- Merencanakan kurikulum yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan semua siswa.
- Mendorong partisipasi orang tua dalam urusan sekolah.
- Mengupayakan keterlibatan siswa dalam pengembangan kebijakan kelas.
- Membantu siswa menyelesaikan konflik dengan cara yang produktif.
- Berusaha melibatkan seluruh komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup di sekolah dan masyarakat.
- Menahan diri dari berteriak dan pernyataan yang tidak senonoh atau menghasut.
- Berpenampilan rapi, tepat waktu, dan berperilaku aman dan bertanggung jawab.

- Mengupayakan perubahan dengan cara yang tertib dan disetujui.

Siswa diminta:

- Menghadiri semua kelas setiap hari dan datang tepat waktu.
- Bersiap dan datang ke kelas dengan perlengkapan kerja yang sesuai.
- Hormati semua individu dan properti.
- Hindari pernyataan yang tidak senonoh atau menghasut.
- Berperilaku dengan aman dan bertanggung jawab.
- Bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri.
- Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sekolah dan wali kelas masing-masing.
- Bersikap kooperatif dan suportif terhadap orang lain di lingkungan sekolah.

Orang Tua/Wali untuk:

- Menghormati sekolah, stafnya, dan misinya.
- Menjalin komunikasi rutin dengan pihak sekolah mengenai perkembangan anak-anak mereka.
- Memastikan anak mereka hadir setiap hari dan segera melaporkan serta menjelaskan ketidakhadiran atau keterlambatan kepada pihak sekolah.
- Memberikan anak mereka sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kelas dan pekerjaan rumah.
- Memberikan anak mereka dukungan emosional yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sehari-hari.
- Membantu anak mereka agar tetap sehat, terawat, rapi, dan bersih.
- Memberikan perhatian kepada pihak berwenang sekolah atas setiap masalah atau kondisi yang memengaruhi anak mereka atau anak-anak lain di sekolah atau komunitas.
- Membahas rapor dan tugas pekerjaan dengan anak mereka.
- Memperbarui nomor telepon rumah, kantor, dan nomor telepon darurat di sekolah.
- Mendorong anak mereka untuk menghabiskan waktu dengan cara yang produktif.
- Menghormati waktu dan batasan pribadi staf.

Keyakinan dan Perilaku Utama

Di FACTS, siswa akan didorong untuk membuat pilihan yang tepat terkait perilaku pribadi mereka.

Interaksi sehari-hari antara staf dan siswa memberikan kesempatan terbaik untuk mendorong perilaku yang tepat dan mendorong pengembangan kebiasaan baik. Staf di sekolah akan berinteraksi dengan siswa dengan ramah dan suportif. Perilaku yang diharapkan dapat diringkas dalam tiga area: rasa hormat, kepedulian, dan rasa aman. Keyakinan dan perilaku yang terkait dengan area-area ini diuraikan di bawah ini:

Menghormati / Bersikap Menghormati

Keyakinan Utama:

- Kami percaya bahwa kami harus menghormati setiap orang dan ide-ide mereka.

Perilaku Utama:

- Kami memperlakukan setiap orang sebagai orang yang berharga, layak mendapatkan kebesaran dan kebaikan.
- Kami memperlakukan orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan.
- Kami selalu menunjukkan rasa hormat kepada semua orang.
- Kami senantiasa mempraktikkan kesopanan.
- Kami menghormati fasilitas sekolah.
- Kami tetap fokus pada tugas selama jam kerja.

Diperhatikan / Peduli

Keyakinan Utama:

- Kami percaya bahwa setiap orang penting dan istimewa, sehingga kami saling peduli.
- Kami percaya tidak ada tempat untuk perundungan di sekolah kami.
- Kami mempromosikan komunitas yang peduli dan inklusif.

Perilaku Utama:

- Kami memperlakukan orang lain secara setara dan melibatkan orang lain dalam kegiatan kami; kami bekerja sama.
- Kami mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik.
- Kami tidak menyakiti satu sama lain secara fisik maupun emosional.
- Kami mempertimbangkan perasaan orang lain dan menghindari menyakiti, menghina, dan mengolok-olok mereka.
- Kami menggunakan kata-kata kami atau mencari bantuan, mendiskusikan perbedaan pendapat kami, dan menggunakan resolusi konflik.
- Kami memperhatikan ketika seseorang membutuhkan bantuan dan kami mengulurkan tangan.

Aman / Menjaga Keamanan

Keyakinan Utama:

- Kami mendorong rasa aman bagi semua orang.
- Kami percaya bahwa semua siswa harus bebas dari perundungan.

Perilaku Utama:

- Kami memperhatikan orang lain.
- Kami menghormati guru dan teman sekelas kami.
- Kami bermain dengan aman.
- Kami mematuhi aturan.

Iklm Sekolah yang Positif

Para siswa di Sekolah Piagam Folk Arts Cultural Treasures didorong untuk mengembangkan motivasi intrinsik agar berprestasi, merasa memiliki, berkontribusi, dan terlibat dalam pembelajaran serta pertumbuhan yang bermakna. Sebagai pendidik, tugas kami adalah membantu siswa mempelajari keterampilan ini agar mereka dapat menjadi individu yang berpengetahuan luas dan berkontribusi bagi komunitas mereka.

TINJAUAN PROGRAM PERILAKU POSITIF FACTS

FACTS telah mengadopsi Program Kelas Responsif dan Program Desain Pengembangan dalam upaya untuk menumbuhkan lingkungan sekolah yang peduli, bijaksana, dan terstruktur bagi semua siswa. Setiap guru kelas bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengajarkan prosedur

dan ekspektasi melalui pemodelan interaktif sebagai fokus utama dalam enam minggu pertama sekolah. Setelah kami membangun komunitas kelas dan memperkenalkan aturan serta prosedur melalui pemodelan interaktif, manajemen perilaku yang efektif sepanjang tahun membutuhkan penggunaan tiga elemen: memperkuat, mengingatkan, & mengarahkan kembali bahasa.

Waktu telah dialokasikan di seluruh sekolah untuk Pertemuan Pagi, Lingkaran Kekuasaan dan Rasa Hormat (di SMP), rapat kelas, dan penutup. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat hubungan dalam komunitas kelas, menetapkan standar perilaku, dan mendorong dialog antara siswa dan guru tentang topik-topik yang penting bagi mereka. Pertemuan ini menciptakan komunitas di dalam kelas dan membuat siswa merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka ingin berperilaku positif untuk menjaga rasa kebersamaan tersebut.

MANAJEMEN KELAS

Disiplin di FACTS bersifat proaktif dan reaktif. Secara proaktif, kami bekerja dengan anak-anak untuk menciptakan, mengajarkan, dan mempraktikkan ekspektasi. Secara reaktif, kami menggunakan konsekuensi logis untuk membantu anak-anak mendapatkan kembali kendali, menebus kesalahan, dan kembali ke jalur yang benar ketika mereka lupa atau memilih untuk tidak menjaga diri sendiri atau satu sama lain.

Peran guru adalah:

- menghormati setiap siswa sebagai anggota masyarakat yang penting
- mengajarkan siswa prosedur dan keterampilan sosial
- menggunakan bahasa yang mendorong dan memberdayakan untuk mendukung keberhasilan siswa
- menggunakan konsekuensi logis untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali kendali diri
- mempromosikan pemecahan masalah sebagai alat untuk mengajarkan pemikiran etis dan keanggotaan masyarakat yang terhormat

Peran siswa adalah:

- mengembangkan kendali diri
- menunjukkan perilaku bertanggung jawab yang berkelanjutan
- membangun hubungan positif dengan guru dan teman sebaya
- Menginternalisasi keterampilan peduli, tegas, bertanggung jawab, empati, dan pengendalian diri
- mempercayai guru mereka dan menghormati guru
- memahami & menghormati harapan
- mengembangkan rasa hormat terhadap diri sendiri

Setiap guru kelas bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengajarkan prosedur dan ekspektasi melalui pemodelan interaktif sebagai fokus utama enam minggu pertama sekolah. Manajemen perilaku yang efektif sepanjang tahun membutuhkan penggunaan tiga elemen: memperkuat, mengingatkan, & mengarahkan bahasa.

- **Memperkuat** - memberikan umpan balik positif & berfokus pada tindakan spesifik
Contoh: "Semua orang melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mempersiapkan kelas berikutnya. Kalian membereskan pekerjaan, berbaris dengan tenang, dan menunggu dengan tenang sampai saya memberi tanda untuk meninggalkan ruangan."
- **Mengingat** - digunakan ketika siswa mulai menyimpang dari jalur, setelah liburan panjang, atau tepat sebelum waktu khusus
Contoh: "Tunjukkan padaku bagaimana kita berbaris. Tunjukkan padaku bagaimana kamu harus berdiri."
- **Mengarahkan** - digunakan ketika seorang siswa menyimpang dari jalur dan perlu dihentikan dan diarahkan ke arah yang benar. (Penting bagi nada bicara guru untuk tidak menghakimi & tanpa amarah).

Contoh: "Jan, diamlah! Itu terlihat berbahaya. Tunjukkan padaku cara yang lebih aman."

KONSEKUENSI LOGIS

Siswa perlu memahami makna disiplin dan bahwa terdapat logika dan alasan mengapa tindakan tertentu menghasilkan hasil tertentu. Guru membantu siswa memperhatikan dan merenungkan hubungan antara tindakan mereka dan konsekuensinya. Perilaku yang tidak diinginkan atau tidak pantas memerlukan konsekuensi logis. Tujuan konsekuensi logis adalah memberi anak kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali diri, mengenali hubungan antara tindakan mereka dan akibat dari tindakan tersebut, memperbaiki masalah yang disebabkan oleh perilaku mereka, memperbaiki & menjaga hubungan, serta menghindari masalah serupa di masa mendatang. Konsekuensi logis tidak dimaksudkan untuk membuat anak merasa bersalah atau "membayar kesalahan mereka". Sebaliknya, konsekuensi logis harus memberi siswa kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan menginternalisasi harapan. Konsekuensi logis harus:

- Menghormati - kata-kata & nada suara guru menunjukkan rasa hormat kepada anak-anak.
- Relevan - konsekuensi harus berkaitan langsung dengan tindakan anak.
- Realistis - konsekuensi haruslah sesuatu yang dapat dilakukan anak secara wajar dan dapat ditindaklanjuti oleh guru.

TIGA JENIS KONSEKUENSI LOGIS

1. "Kamu merusaknya, Kamu memperbaikinya" - Anak-anak bertanggung jawab untuk memperbaiki, sebisa mungkin, masalah apa pun yang mereka ciptakan. Apology of Action adalah bentuk "Kamu merusaknya, Kamu memperbaikinya" di mana anak-anak tidak hanya sekadar mengatakan "Maaf" tetapi juga menebus kesalahan atas perilaku yang menyakitkan. Mereka berusaha memperbaiki perasaan terluka dan hubungan yang rusak.

Contoh "Permintaan Maaf atas Tindakan"

Cara kita menyakiti perasaan orang lain	Cara kita memperbaiki perasaan orang lain
Memanggilmu dengan sebutan yang tidak pantas	Buat daftar hal-hal baik yang bisa mereka katakan tentangmu
Membentak atau membentakmu	Lakukan sesuatu yang baik untukmu agar kamu tersenyum
Menertawakanmu saat kamu melakukan kesalahan	Menulis catatan untukmu yang menceritakan semua hal yang kamu lakukan dengan baik
Mengolok-olok pekerjaanmu	Temukan hal-hal positif untuk dibagikan tentang pekerjaanmu
Sengaja mengecualikan dari suatu kegiatan	Mengajakmu melakukan suatu kegiatan bersamanya

2. Kehilangan Hak Istimewa - Menetapkan aturan bersama menyiratkan kepercayaan di antara semua orang dalam kelompok. Dengan kepercayaan ini muncullah hak istimewa di kelas: menggunakan materi & area kerja, bekerja dengan teman, memilih kegiatan belajar, bergabung

dengan kelompok. Ketika seorang siswa melanggar kepercayaan itu, misalnya, dengan bersikap ceroboh atau tidak aman, konsekuensi logisnya adalah guru akan mencabut hak istimewa tersebut hingga anak tersebut menunjukkan kesiapan untuk menerima hak istimewa tersebut. Guru juga menyediakan proses yang membantu anak belajar & menunjukkan bahwa ia siap untuk mencoba lagi.

3. Beristirahat Sejenak - Tetapkan satu atau dua tempat khusus (yang terlihat oleh guru tetapi tidak di depan kelompok). Perkenalkan "Beristirahat Sejenak" dengan diskusi & contoh. Ajarkan, contohkan, dan praktikkan cara untuk "Beristirahat Sejenak", cara mendapatkan kembali kendali, cara mengetahui kapan waktunya meninggalkan area "Beristirahat Sejenak" & cara kembali ke kelompok. "Beristirahat Sejenak" singkat. Anak-anak kembali ke kelompok ketika mereka menyadari bahwa mereka telah mendapatkan kembali kendali. Guru harus menggunakan suara yang tegas dan tenang ketika meminta siswa untuk pergi ke area "Istirahat".

Kenakalan Berat atau Berkelanjutan: Jika kenakalan tersebut berlanjut atau parah, guru akan menulis surat pelanggaran dan merujuk siswa tersebut ke Direktur Budaya Sekolah.

Sistem Dukungan Berjenjang (MTSS)

Sistem Dukungan Berjenjang (MTSS) FACTS adalah proses kolaboratif tiga tingkat yang dengannya kami mengidentifikasi hambatan pembelajaran dan menghilangkan hambatan tersebut dengan mengakses sumber daya internal (berbasis sekolah) dan eksternal (berbasis komunitas). Inti dari MTSS adalah ruang kelas, tempat guru kelas menganalisis kekuatan dan kebutuhan belajar siswa mereka dan mengadaptasi instruksi dan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal. FACTS menggunakan proses MTSS untuk mengatasi tantangan akademik dan perilaku.

Tim Dukungan Siswa (Konselor Sekolah, Pekerja Sosial Sekolah, Direktur Budaya Sekolah, Supervisor Pendidikan Khusus, Koordinator Intervensi, dan Kepala Sekolah) dan tim tingkat kelas yang terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada, perawat sekolah, guru kelas, guru pendidikan khusus, dan guru Pengembangan Bahasa Inggris (ELD) mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan rekomendasi penyediaan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan perilaku.

MTSS-B adalah sistem dukungan berjenjang untuk mengatasi tantangan perilaku. Dukungan Tingkat 1 mencakup praktik terbaik yang diberikan kepada semua siswa serta diferensiasi yang tersedia bagi semua siswa. Dukungan Tingkat 2 adalah dukungan tambahan standar seperti penyusunan Rencana Dukungan Sosial/Emosional/Perilaku yang dirancang bagi siswa yang tidak berhasil dengan Tingkat 1 saja. Dukungan Tingkat 3 adalah dukungan yang sangat individual, biasanya versi intensif dari Tingkat 2, bagi siswa yang tidak berhasil dengan Tingkat 2. Orang tua akan diberitahu dan diundang untuk memberikan masukan jika anak mereka terpilih untuk Proses MTSS, dan informasi terbaru akan diberikan selama proses berlangsung.

Perilaku Tidak Pantas atau Perilaku yang Tidak Dapat Diterima

Guru kelas diharapkan dapat menangani perilaku buruk di kelas mereka dengan jelas dan konsisten, serta berkomunikasi langsung dengan orang tua ketika ada masalah.

Kami berharap siswa kami akan berusaha memenuhi harapan FACTS terkait tanggung jawab dan disiplin diri. Siswa diharapkan bertanggung jawab atas konsekuensi dari perilaku buruk mereka dan memperbaiki atau memulihkan situasi. Kami juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan perilaku mereka dan memantau perilaku mereka sendiri dari waktu ke waktu.

Jika perilaku buruk tersebut terus berlanjut atau parah, guru akan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh sekolah.

Ketika Direktur Budaya Sekolah (DOSC) menerima pemberitahuan pelanggaran Kode Etik, mereka bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Direktur Budaya Sekolah akan mengidentifikasi perilaku buruk dan siswa yang bertanggung jawab, menjelaskan konsekuensinya, dan dengan demikian memungkinkan siswa untuk memikirkan tindakan mereka dan cara mencegah perilaku buruk serupa di masa mendatang. DOSC akan berkomunikasi dengan keluarga.

Kami tidak menganut Kebijakan Tanpa Toleransi yang secara kaku menerapkan konsekuensi dan hukuman untuk pelanggaran tertentu. Sebaliknya, kami meninjau, menilai, dan menangani setiap situasi individual dengan perhatian yang semestinya.

Contoh perilaku yang tidak dapat diterima:

1. Tidak kooperatif: termasuk tetapi tidak terbatas pada sikap tidak hormat terhadap staf dan rekan kerja, serta penolakan untuk mengikuti arahan.
2. Berbahaya secara fisik: termasuk tetapi tidak terbatas pada perkelahian, penyerangan, intimidasi fisik, sentuhan yang tidak pantas, atau ancaman.
3. Menciptakan Iklim Sekolah yang Mengintimidasi, Bermusuhan, atau Menyinggung: termasuk tetapi tidak terbatas pada perundungan, pelecehan bias, pelecehan seksual, intimidasi, dan **aktivitas online yang menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat**.
4. Ilegal: termasuk tetapi tidak terbatas pada pencurian, vandalisme, penggunaan zat terlarang, kepemilikan senjata, dan ancaman dengan maksud untuk menyakiti.

Perilaku yang tidak dapat diterima memiliki konsekuensi.

Akan ada konsekuensi bagi siswa yang melanggar kebijakan Kode Etik sekolah atau terlibat dalam perilaku yang tidak dapat diterima. Kepala Sekolah, Direktur Budaya Sekolah, atau orang yang ditunjuknya, atas kebijakannya sendiri, dapat memberikan konsekuensi yang lebih berat atau lebih ringan dari berbagai pilihan yang disajikan di bawah ini, tergantung pada jumlah dan/atau sifat perilaku tidak pantas siswa.

Sekolah akan berkomunikasi dengan keluarga ketika siswa mereka melakukan tindakan pemulihan atau menerima konsekuensi akibat pelanggaran Kode Etik.

Siswa akan belajar bahwa tindakan tertentu tidak dapat diterima di sekolah dan perilaku buruk memiliki konsekuensi. Siswa yang terlibat dalam segala jenis perilaku buruk, baik ringan maupun berat, diwajibkan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan keadaan.

Restitusi dapat berupa permintaan maaf, layanan masyarakat atau sekolah, atau perbaikan, penggantian, dan/atau pembayaran atas kerusakan yang ditimbulkan. Siswa akan berpartisipasi dalam diskusi untuk menentukan restitusi yang akan dilakukan.

akan diberitahu tentang perilaku anak yang tidak pantas dan ganti rugi yang disepakati dengan guru

Tidak semua proses berhasil untuk setiap anak.

Kami memahami bahwa tidak ada satu pun prosedur yang efektif dalam membantu setiap siswa mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, serangkaian intervensi telah dirancang untuk siswa yang belum termotivasi oleh prosedur sekolah. Seiring guru menyesuaikan prosedur disiplin untuk memenuhi kebutuhan individu, fokus akan tetap positif dan penekanan akan diberikan pada kebutuhan berkelanjutan akan konsekuensi yang tenang dan konsisten.

Kami bekerja dengan anak-anak untuk menciptakan, mengajarkan, dan mempraktikkan ekspektasi. Kami menggunakan konsekuensi logis untuk membantu anak-anak mendapatkan

kembali kendali, menebus kesalahan, dan kembali ke jalur yang benar ketika mereka lupa atau memilih untuk tidak mengurus diri sendiri atau satu sama lain.

Saat menentukan konsekuensi atas perilaku buruk siswa, guru, administrator, dan staf FACTS harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Usia, kondisi kesehatan, disabilitas, atau status pendidikan khusus siswa, perkembangan pembelajaran bahasa Inggris (ELD)
- Kesesuaian penempatan akademik siswa
- Perilaku dan riwayat perilaku siswa sebelumnya
- Kesiapan siswa untuk memperbaiki kesalahan
- Keseriusan pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan
- Dampak insiden terhadap komunitas sekolah secara keseluruhan

Hak dan Proses Hukum Siswa dengan Rencana Pendidikan Individual (IEP): Semua siswa yang mengikuti FACTS diberikan hak dan proses hukum

Siswa dengan Rencana Pendidikan Individual (IEP) akan menerima sidang penentuan manifestasi sebelum mengeluarkan rekomendasi skorsing atau pengusiran jangka panjang. FACTS diwajibkan untuk menyerahkan laporan semua insiden pelanggaran disiplin yang konsekuensinya berupa skorsing di dalam sekolah, skorsing di luar sekolah, dan/atau pengusiran kepada negara bagian Pennsylvania dan Pemerintah Federal setiap tahun.

Kemungkinan Konsekuensi atas Perilaku Buruk

Detensi

1. Detensi Makan Siang (Selama jam makan siang siswa)
2. Detensi Waktu Istirahat
3. Detensi Setelah Sekolah
4. Detensi Hari Sabtu

Tujuan dan sikap sekolah adalah memaksimalkan waktu istirahat untuk bermain dan bersosialisasi. Tujuan sekolah adalah agar siswa memiliki waktu istirahat sebanyak mungkin sesuai jadwal mereka. Jika konsekuensi logisnya adalah tidak adanya waktu istirahat, Direktur Budaya Sekolah dapat mengeluarkan detensi waktu istirahat.

Merupakan tanggung jawab staf sekolah untuk memberi tahu orang tua minimal 24 jam sebelum menetapkan penahanan setelah sekolah.

Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan transportasi ke dan dari tempat penahanan yang ditentukan. Kegagalan siswa untuk melapor ke tempat penahanan yang ditentukan dapat mengakibatkan tindakan disipliner lebih lanjut.

Pemantauan Siswa

Kemitraan antara keluarga dan sekolah sangat penting bagi keberhasilan siswa. Oleh karena itu, FACTS mencari cara alternatif untuk mengatasi perilaku yang berdampak negatif terhadap lingkungan belajar; keselamatan siswa, staf, dan sekolah; serta kesejahteraan kelas dan iklim sekolah.

Direktur Budaya Sekolah dan/atau Kepala Sekolah dapat meminta orang tua/wali atau orang dewasa yang ditunjuk untuk memantau siswa jika pemantauan tersebut dianggap dapat membantu

memperbaiki masalah atau perilaku, mendukung iklim kelas/sekolah, dan/atau mendorong kemitraan yang lebih kuat antara keluarga dan sekolah untuk mendukung siswa tersebut.

Pengawasan ini dapat berfungsi sebagai tambahan atas skorsing, tetapi juga dapat berfungsi sebagai konsekuensi tersendiri. Hal ini didasarkan pada kebijaksanaan Direktur Budaya Sekolah dan/atau Kepala Sekolah.

Pedoman akan ditinjau bersama orang tua/wali atau orang dewasa yang ditunjuk sebelum pemantauan dimulai.

Skorsing

Ada beberapa alasan mengapa sekolah dapat menetapkan hukuman yang tepat untuk perilaku buruk berupa skorsing. Skorsing dapat diberikan untuk memberikan waktu bagi Tim Sekolah untuk menentukan rencana keselamatan bagi siswa dan komunitas. Skorsing dapat memberikan waktu bagi siswa untuk memproses dan merenungkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap komunitas sekolah. Skorsing dapat diberikan jika kehadiran siswa menimbulkan gangguan yang luar biasa bagi kelas atau komunitas sekolah, atau jika kelas atau komunitas sekolah membutuhkan waktu untuk pulih dan mendapatkan kembali keseimbangan setelah pelanggaran terjadi.

Skorsing dari sekolah dapat berupa skorsing di dalam atau di luar sekolah. Skorsing adalah dikeluarkan dari sekolah untuk jangka waktu satu (1) hingga sepuluh (10) hari sekolah berturut-turut.

Skorsing di sekolah

Siswa harus diberitahu tentang alasan skorsing di sekolah sebelum penerapannya. Komunikasi kepada orang tua atau wali akan dilakukan setelah tindakan penangguhan yang diambil oleh sekolah.

Jika penangguhan di sekolah melebihi sepuluh (10) hari sekolah berturut-turut, sidang informal dengan kepala sekolah atau administrator lain akan ditawarkan kepada siswa dan orang tua atau wali siswa sebelum hari sekolah ke-11 sesuai dengan prosedur dalam Kode Pennsylvania.

Skorsing di luar sekolah

Skorsing dapat diberikan oleh Direktur Kebudayaan Sekolah, Kepala Sekolah, atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pihak sekolah siswa bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan bagi siswa selama masa penangguhan di sekolah.

Seorang siswa harus diberitahu alasan penangguhan sebelum menjalani penangguhan. Pemberitahuan penangguhan sebelumnya tidak diperlukan jika kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, atau integritas komunitas sekolah jelas terancam. Orang tua atau wali harus diberitahu tepat waktu secara tertulis ketika siswa diskors.

Jika penangguhan melebihi tiga (3) hari sekolah, siswa dan orang tua akan diberikan kesempatan untuk menghadiri sidang informal sesuai dengan persyaratan Kode Pennsylvania.

Pengeluaran

Pelanggaran yang Dapat Dikenakan Pengeluaran: mencakup perilaku yang:

- Menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman;

- Menghambat pendidikan orang lain;
- Menimbulkan cedera fisik atau psikologis pada orang lain;
- Menyebabkan orang lain merasa terintimidasi, tidak diterima, dan tidak aman;
- Melanggar hukum;
- Melanggar kebijakan Anti-Perundungan dan Anti-Pelecehan (termasuk perundungan siber)

Seorang siswa dapat direkomendasikan kepada Dewan Pengawas untuk Skorsing di Luar Sekolah selama Satu Minggu dan Pengeluaran. Skorsing selama lebih dari sepuluh hari berturut-turut dianggap sebagai pengeluaran. Orang tua dan wali akan diberitahu secara tertulis mengenai tanggal dan waktu sidang, dan dipersilakan untuk hadir dan berbicara mengenai perilaku anak mereka pada sidang pengeluaran.

Pengeluaran dari sekolah merupakan respons paling ekstrim terhadap masalah disiplin. Tindakan ini diperuntukkan bagi pelanggaran disiplin paling berat yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan fungsi sekolah serta komunitas sekolah. Pengusiran adalah pengeluaran dari sekolah oleh dewan pengurus untuk jangka waktu lebih dari sepuluh (10) hari sekolah berturut-turut dan dapat bersifat permanen berdasarkan rekomendasi dewan pengurus. Pengusiran memerlukan sidang formal sebelumnya sesuai dengan Kode Pennsylvania.

1) Selama periode sebelum sidang dan keputusan dewan dalam kasus pengeluaran, siswa akan ditempatkan di kelas normalnya kecuali sebagaimana tercantum dalam ayat (b).

2) Jika setelah sidang informal diputuskan bahwa kehadiran siswa di kelas normalnya akan membahayakan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, atau integritas komunitas sekolah, dan sidang formal tidak memungkinkan untuk diadakan selama masa skorsing, siswa tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah selama lebih dari sepuluh (10) hari sekolah. Siswa tidak boleh dikeluarkan dari sekolah selama lebih dari lima belas (15) hari sekolah tanpa sidang formal kecuali disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Siswa yang dikeluarkan tersebut akan diberikan pendidikan alternatif, yang dapat mencakup pembelajaran di rumah.

- A. Tanggung jawab awal untuk menyediakan pendidikan yang dibutuhkan berada di tangan orang tua atau wali siswa, melalui penempatan di sekolah lain, tutorial atau program studi korespondensi, atau program pendidikan lain yang disetujui oleh pengawas distrik.
- B. Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tindakan oleh dewan, orang tua atau wali harus menyerahkan bukti tertulis kepada sekolah bahwa pendidikan yang dibutuhkan telah disediakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) atau bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jika orang tua atau wali tidak dapat menyediakan pendidikan yang dibutuhkan, pihak sekolah harus, dalam waktu sepuluh (10) hari sejak menerima pemberitahuan, menyediakan layanan pendidikan bagi siswa tersebut. Siswa penyandang disabilitas harus diberikan layanan pendidikan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Pendidikan Individu Penyandang Disabilitas 2004.
- C. Jika program pendidikan yang disetujui tidak dipatuhi, sekolah dapat mengambil tindakan sesuai dengan 42 Pa.C.S. Bab 63 (terkait dengan Undang-Undang Anak) untuk memastikan bahwa anak tersebut akan menerima pendidikan yang layak. Lihat § § 12.1 (b) (berkaitan dengan pendidikan dan kehadiran gratis).

3) Peserta didik yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tetap terikat dengan hukum wajib belajar meskipun dikeluarkan dari sekolah dan wajib memperoleh pendidikan.

Sidang

Umum: Pendidikan adalah hak yang dilindungi undang-undang, dan siswa berhak atas proses hukum yang semestinya jika mereka dikeluarkan dari sekolah. Dalam kasus yang melibatkan kemungkinan dikeluarkannya siswa, siswa berhak atas sidang formal.

Sidang Formal: Sidang formal diwajibkan dalam semua situasi pengeluaran siswa. Sidang ini dapat diadakan di hadapan dewan atau komite dewan yang berwenang, atau pemeriksa sidang yang berkualifikasi yang ditunjuk oleh dewan. Ketika komite dewan atau pemeriksa sidang memimpin sidang, suara mayoritas dari seluruh dewan diperlukan untuk mengeluarkan siswa. Proses hukum berikut ini wajib dipenuhi sehubungan dengan sidang formal:

1. Pemberitahuan mengenai dakwaan harus dikirimkan kepada orang tua atau wali siswa melalui surat tercatat.
2. Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat sidang harus diberikan setidaknya tiga (3) hari sebelumnya. Salinan kebijakan pengeluaran, pemberitahuan bahwa penasihat hukum dapat mewakili siswa, dan prosedur sidang harus disertakan dalam pemberitahuan sidang. Siswa dapat meminta penjadwalan ulang sidang jika siswa menunjukkan alasan yang kuat untuk perpanjangan sidang.
3. Sidang akan diadakan secara tertutup, kecuali siswa atau orang tua meminta sidang terbuka.
4. Siswa dapat diwakili oleh penasihat hukum, dengan biaya ditanggung oleh orang tua atau wali, dan dapat menghadirkan orang tua atau wali di sidang.
5. Siswa berhak untuk menerima nama-nama saksi yang memberatkan siswa, dan salinan pernyataan serta affidavit para saksi tersebut.
6. Siswa berhak meminta para saksi hadir secara langsung dan menjawab pertanyaan atau diperiksa silang.
7. Siswa berhak untuk bersaksi dan menghadirkan saksi atas nama mereka sendiri.
8. Rekaman tertulis atau audio harus disimpan dari persidangan. Siswa berhak mendapatkan salinannya, dengan biaya sendiri. Salinan akan diberikan secara gratis kepada siswa yang tidak mampu.
9. Sidang akan dilaksanakan dalam waktu lima belas (15) hari sekolah sejak pemberitahuan tuntutan, kecuali disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sidang dapat ditunda karena salah satu alasan berikut, yang dalam hal ini sidang akan dilaksanakan sesegera mungkin:
 1. Laporan laboratorium diperlukan dari lembaga penegak hukum.
 2. Evaluasi atau proses pengadilan atau administratif lainnya sedang berlangsung karena siswa menggunakan haknya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Individu Penyandang Disabilitas 2004 (20 U.S.C.A. § § 1400-1482).
 3. Dalam kasus pengadilan anak atau pidana yang melibatkan kekerasan seksual atau cedera tubuh serius, penundaan diperlukan demi kondisi atau kepentingan terbaik korban.

10. Pemberitahuan tentang hak untuk mengajukan banding terhadap hasil sidang harus diberikan kepada mahasiswa bersama dengan keputusan pengusiran.

Semua sidang akan berlangsung di hadapan petugas sidang. Petugas sidang tersebut akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Administrasi dan mahasiswa sehubungan dengan sidang formal dan akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pembina.

Sidang Informal: Tujuan sidang informal adalah untuk memungkinkan siswa bertemu dengan pejabat sekolah yang berwenang guna menjelaskan keadaan seputar acara yang menyebabkan

siswa tersebut diskors atau untuk menunjukkan alasan mengapa siswa tersebut tidak seharusnya diskors.

1. Sidang informal diadakan untuk memberikan semua informasi relevan mengenai acara yang dapat menyebabkan siswa tersebut diskors, dan agar pejabat sekolah dan orang tua atau wali dapat membahas cara-cara untuk menghindari pelanggaran di masa mendatang.
2. Persyaratan proses hukum berikut harus diperhatikan sehubungan dengan sidang informal:
 - a. Pemberitahuan alasan penangguhan harus disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali siswa.
 - b. Pemberitahuan yang memadai mengenai waktu dan tempat sidang informal harus diberikan.
 - c. Siswa berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam sidang tersebut.
 - d. Siswa berhak untuk berbicara dan menghadirkan saksi atas namanya sendiri.
 - e. Pihak sekolah harus menawarkan untuk mengadakan sidang informal dalam lima (5) hari pertama sejak penangguhan.

Persyaratan untuk Petugas Sidang dan Panel Disiplin

Dewan Pembina Sekolah Piagam Seni Rakyat-Harta Budaya menyadari pentingnya memastikan bahwa semua siswa yang menjalani proses disiplin dalam bentuk sidang formal mendapatkan proses hukum yang semestinya. Untuk memastikan bahwa setiap anggota Dewan Pembina yang ditunjuk untuk memimpin sidang formal memenuhi syarat untuk melakukannya, Dewan Pembina menetapkan standar minimum kualifikasi berikut.

Seseorang yang ditunjuk untuk memimpin sidang disiplin formal harus:

- Bersikap tidak memihak, tidak memihak, dan objektif, termasuk, namun tidak terbatas pada,
- Tidak memiliki kepentingan finansial atau pribadi dalam hasil sidang; dan
- Tidak memiliki keterlibatan sebelumnya dengan anak, baik secara pribadi maupun profesional, yang akan mengganggu kemampuannya untuk memimpin sidang secara objektif.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif;
- Memahami peran petugas sidang dalam proses disiplin formal;
- Mengetahui Hukum Federal dan Pennsylvania tentang disiplin siswa pendidikan reguler dan siswa pendidikan khusus;
- Memahami kebijakan sekolah dan Kode Etik Siswa yang berkaitan dengan disiplin;
- Memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan menganalisis secara tidak memihak bukti yang diajukan oleh semua pihak dalam sidang; dan
- Memiliki kemampuan untuk menganalisis secara objektif bukti yang diajukan oleh semua pihak sesuai dengan Hukum Federal dan Pennsylvania, serta kebijakan terkait, untuk mengembangkan rekomendasi disiplin yang akan diajukan kepada Dewan Pengawas.

Sejauh apa pun dalam kebijakan ini, secara keseluruhan atau sebagian, dapat ditafsirkan bertentangan dengan hukum federal atau negara bagian, hukum federal dan negara bagian yang berlaku.

Prosedur Banding

Mengajukan Banding atas Skorsing di Luar Sekolah

Jika orang tua atau wali tidak setuju dengan skorsing di luar sekolah, orang tua atau wali dapat mengajukan banding atas keputusan dengan cara berikut:

- A. Ajukan permintaan tertulis untuk menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Sekolah. Setelah pertemuan, Kepala Sekolah akan mengeluarkan keputusan untuk mencabut atau mempertahankan catatan tindakan disipliner.
- B. Jika orang tua atau wali tidak puas dengan hasil banding kepada
- C. Kepala Sekolah, mereka dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas (alamat emailnya tercantum di situs web FACTS: www.factschool.org). Banding harus diajukan secara tertulis, dalam waktu tiga (3) hari sekolah sejak orang tua atau wali menerima pemberitahuan tindakan disipliner dari Kepala Sekolah, atau hak untuk meninjau banding tersebut akan dicabut.
- D. Jika orang tua tidak puas dengan keputusan Dewan, ia dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut sebagaimana diizinkan oleh hukum.

Jika Kepala Sekolah memutuskan bahwa kehadiran siswa di sekolah tidak menimbulkan bahaya berkelanjutan bagi orang atau properti, atau ancaman gangguan yang berkelanjutan, siswa tersebut dapat diizinkan untuk tetap bersekolah secara teratur hingga banding dipertimbangkan. Keputusan yang menguntungkan akan mengizinkan siswa untuk tetap bersekolah, sementara keputusan yang menguntungkan Kepala Sekolah akan mengharuskan siswa untuk menjalani masa skorsing penuh mulai sekolah berikutnya setelah menerima pemberitahuan keputusan tersebut. Dalam situasi di mana siswa dikeluarkan selama proses banding dan banding tersebut pada akhirnya menguntungkan siswa, kesempatan akan diberikan untuk menyelesaikan tugas pengganti.

Mengajukan Banding atas Pengusiran

Setelah sidang formal, jika orang tua atau wali tidak setuju dengan keputusan pengusiran, orang tua dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan cara berikut:

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis kepada Dewan Pembina. Permohonan tertulis tersebut harus diajukan kepada Dewan Pembina dalam waktu lima (5) hari kalender sejak keputusan pengusiran; jika tidak, hak untuk meninjau banding akan dicabut.
2. Jika orang tua tidak puas dengan keputusan Dewan Pembina atas banding tersebut, banding dapat diajukan ke Pengadilan Umum dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya putusan tersebut. Jika diduga terdapat masalah konstitusional, siswa dapat mengajukan klaim ganti rugi di Pengadilan Distrik Federal yang sesuai. Siswa dan orang tua/wali mereka akan diberitahu tentang hak-hak ini.

Pendisiplinan Siswa Disabilitas

Sekolah Piagam Folk Arts-Cultural Treasures wajib mematuhi Undang-Undang Peningkatan Pendidikan Individu Penyandang Disabilitas (IDEA 2004) dan undang-undang atau peraturan federal dan negara bagian yang berlaku saat mendisiplinkan siswa penyandang disabilitas. Siswa penyandang disabilitas yang terlibat dalam perilaku tidak pantas, aktivitas yang mengganggu atau dilarang, dan/atau perilaku yang merugikan diri sendiri dan/atau orang lain akan didisiplinkan sesuai dengan Program Pendidikan Individual (IEP), rencana intervensi perilaku, Bab 22, Bab 711, dan bagian terkait dari Bab 12 Peraturan Dewan Pendidikan Negara Bagian, IDEA 2004, Pasal 504 Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973, Bab II Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika tahun 1990, dan undang-undang federal atau negara bagian lainnya yang berlaku.

Penetapan Manifestasi wajib dibuat bagi siswa dengan IEP atau Perjanjian Layanan Bagian 504 jika terdapat salah satu hal berikut yang dipertimbangkan:

- Rujukan Pengusiran
- Permintaan untuk dipindahkan ke Pengaturan Alternatif karena alasan disiplin
- Penangguhan selama lebih dari 10 hari berturut-turut

- Penangguhan selama lebih dari 15 hari kumulatif
- Penangguhan dengan total lebih dari 10 hari dalam satu tahun ajaran dan jika terdapat pola perilaku bermasalah
- Pengecualian siswa penyandang disabilitas intelektual untuk jangka waktu berapa pun

Tim harus mengadakan rapat Penentuan Manifestasi dan mengundang orang tua/wali. Tim harus:

- Memberikan pemberitahuan tertulis kepada orang tua/wali tentang tindakan disipliner yang direkomendasikan dan tanggal rapat IEP yang diusulkan.
- Selama rapat Penentuan IEP/Manifestasi, tim IEP akan meninjau evaluasi, IEP, dan penempatan siswa terbaru untuk menentukan apakah pelanggaran yang dirujuk terkait dengan disabilitas siswa.

Secara umum, dalam waktu sepuluh (10) hari sekolah sejak keputusan apa pun untuk mengubah penempatan anak penyandang disabilitas karena pelanggaran tata tertib siswa, sekolah, orang tua, dan anggota Tim IEP yang relevan (sebagaimana ditentukan oleh orang tua dan Sekolah) harus meninjau semua informasi relevan dalam berkas siswa, termasuk IEP anak, setiap pengamatan guru, dan informasi relevan apa pun yang diberikan oleh orang tua untuk menentukan

- apakah perilaku yang dimaksud disebabkan oleh, atau memiliki hubungan langsung dan substansial dengan, disabilitas anak; atau
- apakah perilaku yang dimaksud merupakan akibat langsung dari kegagalan Sekolah dalam menerapkan IEP.

Jika Sekolah, orangtua, dan anggota Tim IEP yang relevan menentukan bahwa sub klausul (i) atau (ii) berlaku untuk anak tersebut, perilaku tersebut akan ditetapkan sebagai manifestasi dari disabilitas anak tersebut.

Selanjutnya, Tim IEP harus

1) Melakukan:

(i) Penilaian Perilaku Fungsional (“FBA”) dan menerapkan rencana intervensi perilaku untuk Siswa; atau

(ii) Jika FBA telah dilakukan sebelum pelanggaran, maka rencana intervensi perilaku harus ditinjau untuk modifikasi yang diperlukan guna mengatasi perilaku yang dimaksud;

2) Siswa kemudian dikembalikan ke penempatan semula kecuali Sekolah dan orang tua menyetujui sebaliknya.

Jika diputuskan bahwa perilaku tersebut bukan merupakan manifestasi dari disabilitas Siswa, maka pihak sekolah dapat menerapkan prosedur disiplin yang relevan kepada Siswa tersebut sebagaimana yang akan diterapkan kepada siswa tanpa disabilitas. Satu-satunya perbedaan adalah Siswa penyandang disabilitas harus tetap berpartisipasi dalam kurikulum pendidikan umum dan mencapai tujuan IEP, meskipun dalam lingkungan yang berbeda. Siswa akan menerima, jika sesuai, Penilaian Perilaku Fungsional (FBA) dan layanan intervensi perilaku serta modifikasi yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran perilaku tersebut guna mencegah terulangnya kembali.

Mengajukan Banding atas Tindakan Disiplin Siswa Disabilitas

Orang tua siswa penyandang disabilitas dapat mengajukan banding atas keputusan apapun terkait penempatan atau penentuan manifestasi.

Sekolah dapat mengajukan banding atas pemeliharaan penempatan saat ini jika kemungkinan mengakibatkan cedera pada Siswa atau orang lain.

Dalam situasi apa pun, Siswa harus tetap berada di lingkungan pendidikan alternatif sementara sambil menunggu keputusan petugas sidang atau berakhirnya jangka waktu sesuai hukum, mana pun yang lebih dulu, kecuali Sekolah dan orang tua menyetujui sebaliknya.

Banding Tindakan Disipliner Siswa Berkebutuhan Khusus

Orang tua seorang siswa berkebutuhan khusus bisa mengajukan banding atas suatu keputusan mengenai penempatan ataupun penetapan manifestasi dari kebutuhan khususnya.

Sekolah bisa tetap mempertahankan penempatan yang telah diberlakukan jika pengubahannya punya kemungkinan membahayakan si siswa atau orang lain.

Dalam keadaan yang manapun, siswa harus tetap pada latar pendidikan alternatif sementara selagi keputusan petugawar dengar pendapatnya masih ditunda atau masa berlakunya sudah habis menurut hukum, tergantung mana yang terjadi lebih dulu, kecuali jika sekolah dan orang tua sepakat sebaliknya.

Melaporkan Kejahatan dan/atau Perilaku Yang Mengganggu

Penting bagi semua siswa dan orang tua untuk memahami bahwa, selain pengambilan tindakan disipliner di tingkat sekolah, perilaku tertentu yang bersifat pidana dan/atau mengganggu harus dilaporkan kepada pihak polisi berwenang yang sesuai. Insiden dibawah ini akan dilaporkan:

- Semua pidana berat
- Serangan atau ancaman penyerangan
- Pemilikan senjata
- Perampokan atau pencurian
- Pelanggaran seksual
- Perusakan harta milik orang lain
- Penggunaan obat-obatan atau Alkohol

Selain itu, Kepala Sekolah memiliki pertimbangan sendiri untuk melaporkan peristiwa lain apapun yang terjadi selama jam kerja reguler di sekolah.

Siswa yang secara resmi mendapat dakwaan melakukan suatu kesalahan oleh jaksa penuntut yang sesuai atas suatu kejadian yang terbukti memiliki dampak yang membahayakan terhadap suatu program, disiplin, atau ketenteraman pendidikan di sekolah, sebagai tindak-lanjut dengar pendapat administratif dan setelah dilakukan pemberitahuan semestinya kepada orang tua atau wali, dan jika penangguhan direkomendasikan, harus mendapat penangguhan dari semua kelas sampai ia ditetapkan terbukti bersalah atau tidak, atau pembebasan dari dakwaan, yang dilakukan oleh suatu pengadilan hukum yang berkompeten.

Kepala Sekolah bisa menangguhkan siswa dalam keadaan-keadaan tertentu untuk jangka waktu lebih dari 10 hari sekolah sepanjang pilihan alternatif waktu siang hari benar-benar dimanfaatkan.

Adalah penting bahwa sekolah harus aman dan tertib guna memberikan lingkungan yang mendukung proses belajar-mengajar serta pencapaian akademik yang tinggi. Demi tujuan tersebut, siswa yang terbukti ketahuan telah melakukan tindakan-tindakan perusakan yang “bisa dilaporkan” di atas terhadap harta kekayaan sekolah, transportasi yang disponsori sekolah, atau ketika ada kegiatan yang disponsori sekolah, bisa dibawa ke depan Dewan Pengawas untuk dikeluarkan berdasarkan penilaian Kepala Sekolah.

Kebijakan Kehadiran dan Pembolosan Siswa

Diadopsi: 17 Agustus 2022

Sekolah Piagam Seni Rakyat-Harta Budaya percaya bahwa kehadiran yang baik sangat penting bagi siswa untuk mencapai dan menggapai potensi mereka.

Sebagai sekolah negeri, FACTS harus mematuhi Persyaratan Kehadiran Wajib dari Departemen Pendidikan Pennsylvania.

Kebutuhan Kehadiran yang Konsisten

Kehadiran yang konsisten memastikan bahwa siswa kami tidak akan kehilangan waktu dan kesempatan belajar yang berharga yang akan meningkatkan kesuksesan mereka di sekolah. Siswa diwajibkan hadir di sekolah setiap hari kecuali untuk:

- Sakit
- Hari raya keagamaan yang disetujui
- Kematian dalam keluarga
- Perawatan medis dan gigi
- Sidang pengadilan
- Karantina Hukum
- Keadaan Darurat Keluarga
- Perjalanan pendidikan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Sekolah
- Kondisi darurat sebagaimana ditentukan oleh Direktur Eksekutif atau yang ditunjuk

Sekolah akan menerima hingga 10 izin ketidakhadiran yang diverifikasi dengan pemberitahuan orang tua dalam satu tahun ajaran. Untuk semua ketidakhadiran di atas jumlah maksimum ini, diperlukan surat keterangan dokter agar ketidakhadiran tersebut dianggap sah. Batas maksimum izin ketidakhadiran dapat diabaikan oleh Direktur Eksekutif atau yang ditunjuknya selama keadaan darurat kesehatan atau keadaan umum lainnya.

Pemberitahuan Ketidakhadiran Wajib

Jika seorang anak tidak hadir, orang tua harus memberi tahu kantor sekolah paling lambat pukul 08.30 pagi pada hari ketidakhadiran tersebut. Untuk setiap ketidakhadiran, panggilan telepon otomatis akan dikirimkan untuk memberi tahu keluarga. Semua siswa yang tidak hadir diharapkan untuk mengirimkan surat keterangan orang tua dalam waktu tiga hari setelah siswa kembali, termasuk tanggal ketidakhadiran, alasan ketidakhadiran, dan tanda tangan orang tua/wali beserta nomor kontak.

Jika seorang siswa tidak hadir selama 3 hari atau lebih berturut-turut karena sakit, orang tua harus memberikan surat keterangan dokter, kecuali untuk ketidakhadiran yang terkait dengan atau karena karantina wilayah. Kami harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencatat kehadiran secara akurat dan jika seorang siswa tidak masuk sekolah, harus ada alasan yang sah. Jika tidak ada alasan yang diberikan atau kantor sekolah tidak dapat memverifikasi ketidakhadiran sebagai alasan yang sah, maka ketidakhadiran tersebut akan dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa alasan.

Harap beritahu perawat sekolah jika anak Anda sakit dengan penyakit menular, misalnya cacar air, radang tenggorokan, COVID-19, dll.

Kebijakan Kehadiran untuk Ketidakhadiran Tanpa Alasan

1 ketidakhadiran - Setiap kali siswa tidak hadir, panggilan telepon dan/atau email otomatis akan dikirimkan ke keluarga.

3 ketidakhadiran - Siswa dengan tiga ketidakhadiran tanpa alasan dalam setahun dianggap membolos. Untuk ketidakhadiran tanpa alasan ketiga, FACTS akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali melalui pos dalam waktu 10 hari sekolah sejak ketidakhadiran tanpa alasan ketiga anak tersebut.

Pemberitahuan ini akan 1) mencakup penjelasan tentang konsekuensi yang akan timbul jika anak tersebut menjadi kebiasaan membolos di kemudian hari; 2) akan menggunakan cara dan bahasa komunikasi yang disukai oleh orang tua/wali; dan 3) mencakup tawaran Konferensi Peningkatan Kehadiran.

6 ketidakhadiran - Siswa dengan enam ketidakhadiran tanpa alasan dalam setahun harus dilaporkan sebagai kebiasaan membolos. Konferensi Kehadiran Siswa akan diselenggarakan dan Rencana Peningkatan Kehadiran Siswa akan disusun dan dibagikan.

Salah satu Direktur Budaya Sekolah akan memberi tahu orang tua/wali mengenai tanggal, waktu, dan tempat Konferensi Peningkatan Kehadiran Siswa.

Tujuan Konferensi Peningkatan Kehadiran adalah untuk membahas penyebab ketidakhadiran siswa dan menyusun rencana yang disepakati bersama untuk memastikan kehadiran siswa secara teratur.

Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk melibatkan dan melibatkan orang tua/wali dalam Konferensi Peningkatan Kehadiran Siswa, Sekolah Charter diperbolehkan untuk melanjutkan Konferensi Peningkatan Kehadiran dan Rencana Peningkatan Kehadiran tanpa kehadiran orang tua siswa di Konferensi.

10 kali atau lebih ketidakhadiran - Jika anak berusia enam (6) tahun atau duduk di kelas 1-3 dan memiliki sepuluh (10) kali atau lebih ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, orang tua atau wali dapat dirujuk ke Departemen Layanan Kemanusiaan (DHS) atas tuduhan membolos. Jika anak tersebut duduk di kelas 4-8, mereka dapat dirujuk ke Pengadilan Pembolosan. Rujukan ke DHS atau Pengadilan Pembolosan hanya dapat dilakukan setelah konferensi peningkatan kehadiran telah diselenggarakan.

Jika anak dirujuk ke DHS atau Pengadilan Pembolosan, penyedia layanan dari DHS akan ditugaskan untuk menangani kasus mereka dan akan memulai kunjungan rumah. Jika kehadiran tidak membaik atau orang tua/wali tidak berpartisipasi dalam layanan sukarela yang ditawarkan oleh penyedia layanan DHS, kasus tersebut dapat dirujuk ke Kejaksaan Distrik untuk penuntutan.

Sekolah Charter tidak akan memberikan sanksi disiplin atas perilaku membolos yang membuat anak tersebut dikeluarkan dari kelas, termasuk skorsing di sekolah, skorsing di luar sekolah, pengusiran, atau pemindahan.

Siswa yang tidak masuk sekolah selama sepuluh (10) hari atau lebih berturut-turut tanpa dokumen yang sesuai akan dikeluarkan dari daftar siswa FACTS. Ketidakhadiran tersebut meliputi tidak memberikan surat keterangan tidak masuk; tidak memberikan surat keterangan dokter untuk ketidakhadiran selama tiga hari atau lebih berturut-turut; melebihi jumlah maksimum ketidakhadiran yang diizinkan tanpa surat keterangan dokter; dan memberikan surat keterangan tidak masuk dengan alasan yang tidak disetujui oleh sekolah.

Sekolah akan menentukan apakah ada kemungkinan seorang anak membolos atau absen kronis karena disabilitas atau kondisi medis. Siswa penyandang disabilitas yang membolos atau absen

kronis karena alasan kesehatan tetap harus menunjukkan alasan yang sah untuk ketidakhadiran apa pun, yang dapat mencakup surat keterangan tertulis dari dokter. Prosedur pencabutan pendaftaran standar tidak berlaku jika siswa dengan IEP telah absen selama 10 hari berturut-turut. Sebaliknya, sekolah harus mematuhi prosedur yang diwajibkan oleh IDEA dan 22 PA Code Bab 14 saat mencabut pendaftaran siswa dengan IEP.

Keterlambatan

Kebiasaan datang tepat waktu ke sekolah akan terus berlanjut seumur hidup dan akan bermanfaat bagi usaha anak. Jika anak terlambat ke sekolah, mereka harus lapor ke resepsionis, mendaftar, dan mendapatkan izin masuk kelas. Pertemuan orang tua akan diminta jika siswa sering terlambat ke sekolah, dan Sekolah Sabtu dapat ditugaskan.

Pemulangan Lebih Awal

Sebisa mungkin, janji temu sebaiknya dijadwalkan setelah jam sekolah karena dapat mengganggu program belajar anak. Jika anak memiliki janji temu yang mengharuskan mereka pulang lebih awal, prosedur berikut harus diikuti:

- Kirimkan surat yang menyatakan alasan pemulangan lebih awal pada pagi hari itu.
- Beri tahu kantor jika ada orang lain selain orang tua/wali yang menjemput anak Anda (orang tersebut harus ada dalam daftar penjemput yang disetujui, dan harus memiliki kartu identitas berfoto untuk alasan keamanan);
- Penjemput yang ditunjuk harus mendaftarkan anak Anda di kantor;
- Mereka yang menjemput siswa, termasuk orang tua, tidak boleh langsung pergi ke ruang kelas anak.

Pulang lebih awal tidak diperbolehkan setelah pukul 13.30 pada hari sekolah reguler, atau satu jam sebelum waktu pulang lebih awal pada hari pulang lebih awal.

Siswa TK hingga kelas delapan tidak boleh diperbolehkan pulang dari sekolah selama jam sekolah reguler tanpa didampingi oleh orang dewasa yang ada dalam daftar penjemputan. Hal ini akan ditegaskan secara ketat.

Kebijakan Anti-Perundungan

Diadopsi 19 Agustus 2009
Diubah 15 Juni 2011
Ditegaskan 19 September 2015
Ditegaskan 21 Agustus 2019
Ditegaskan 20 Juli 2022
Direvisi 21 September 2022
Direvisi 19 Oktober 2022

Dewan Pembina FACTS melarang tindakan perundungan. Lingkungan sekolah yang aman, positif, dan beradab diperlukan bagi siswa untuk belajar dan mencapai standar akademik yang tinggi. Menunjukkan perilaku yang pantas, memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat, serta menolak untuk menoleransi perundungan diharapkan dari para administrator, fakultas, staf, dan sukarelawan untuk memberikan contoh positif bagi perilaku siswa.

Perundungan adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang disengaja, baik secara elektronik, tertulis, verbal, nonverbal, psikologis, maupun fisik, yang ditujukan kepada siswa lain, yang terjadi di dalam dan/atau di luar lingkungan sekolah, yang bersifat parah, terus-menerus, atau meluas, dan berdampak pada hal-hal berikut:

- Mengganggu pendidikan siswa secara substansial;

- Menciptakan lingkungan sekolah yang mengancam; atau
- Mengganggu ketertiban sekolah secara substansial.

Perundungan dicirikan oleh tiga (3) kriteria berikut:

1. Perilaku agresif atau tindakan menyakiti yang disengaja.
2. Dilakukan berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama.
3. Penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan atau menyakiti orang lain.

Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat mencakup berbagai perilaku. Sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan ini, perundungan mengacu pada tindakan langsung atau tidak langsung, yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Fisik – memukul, menendang, mendorong, menyikut, atau membuat orang lain menyakiti seseorang;
- Verbal – hinaan rasial, hinaan, ejekan, pelecehan, dan gosip;
- Nonverbal – mengancam, gestur cabul, isolasi, pengucilan, penguntit;
- Psikologis atau Relasional – melibatkan penyebaran rumor jahat, dan terlibat dalam isolasi sosial atau intimidasi; dan
- Perundungan Siber – segala bentuk perundungan yang terjadi melalui penggunaan perangkat komunikasi elektronik atau melalui media sosial, surel, pesan instan, pesan teks, twit, blog, berbagi foto dan video, termasuk penggunaan AI - Gambar dan video buatan, ruang obrolan, dasbor, situs web, atau aplikasi, termasuk situs web atau aplikasi profil pribadi, seperti Snapchat, Instagram, dan Facebook.

Kebijakan ini bermaksud agar istilah perundungan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, insiden yang secara wajar dianggap dimotivasi oleh karakteristik aktual atau yang dianggap, seperti jenis kelamin, usia, ras, warna kulit, orientasi seksual (yang diketahui atau yang dianggap), ekspresi identitas gender (yang diketahui atau dianggap), asal kebangsaan, agama, disabilitas, status sosial ekonomi, dan/atau keyakinan politik.

Mencegah Perundungan

Dewan Pembina FACTS mengharapkan siswa untuk berperilaku sesuai dengan tingkat perkembangan, kedewasaan, dan kemampuan yang ditunjukkan dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan siswa lain, staf sekolah, sukarelawan, dan kontraktor.

Dewan Pembina FACTS percaya bahwa standar perilaku siswa harus ditetapkan secara kooperatif melalui interaksi antara siswa, orang tua dan wali, staf, dan anggota masyarakat sekolah, sehingga menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk tumbuh dalam disiplin diri. Pengembangan suasana ini membutuhkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, serta terhadap properti sekolah dan masyarakat dari pihak siswa, staf, dan anggota masyarakat

Dewan Pembina FACTS percaya bahwa disiplin terbaik adalah disiplin yang diterapkan sendiri, dan merupakan tanggung jawab staf untuk menggunakan situasi disiplin sebagai kesempatan untuk membantu siswa belajar memikul tanggung jawab dan konsekuensi dari perilaku mereka. Staf yang berinteraksi dengan siswa harus menerapkan praktik terbaik yang dirancang untuk mencegah masalah disiplin dan mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin diri.

Karena dukungan dari pengamat terhadap perundungan dapat mendorong perilaku ini, sekolah melarang dukungan aktif maupun pasif untuk tindakan perundungan. Staf harus mendorong siswa untuk mendukung siswa yang menjauh dari tindakan ini ketika mereka melihatnya, secara konstruktif mencoba menghentikannya, atau melaporkannya kepada pihak berwenang yang ditunjuk.

Prosedur Sekolah: Respons terhadap Perundungan

Dewan Pengawas FACTS mewajibkan administrator sekolahnya untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur yang memastikan adanya konsekuensi dan respons perbaikan yang tepat bagi siswa atau staf yang melakukan satu atau lebih tindakan perundungan.

Konsekuensi dan tindakan perbaikan yang tepat bagi siswa yang melakukan satu atau lebih tindakan perundungan dapat berupa intervensi perilaku positif hingga dan termasuk skorsing atau pengusiran, dalam kasus siswa, atau skorsing atau pemutusan hubungan kerja dalam kasus karyawan, sebagaimana tercantum dalam kode etik siswa atau buku panduan karyawan yang telah disetujui.

Konsekuensi bagi siswa yang melakukan tindakan perundungan bersifat unik untuk setiap insiden dan akan bervariasi dalam metode dan tingkat keparahannya sesuai dengan sifat perilaku, usia perkembangan siswa, dan riwayat perilaku bermasalah serta kinerja siswa, serta harus konsisten dengan kode etik siswa yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas. Tindakan perbaikan harus dirancang untuk: memperbaiki perilaku bermasalah; mencegah terulangnya perilaku tersebut; dan melindungi korban tindakan tersebut. Disiplin yang efektif harus menggunakan pendekatan di seluruh sekolah untuk mengadopsi aturan pelanggaran bullying dan konsekuensi yang terkait.

Proses Pengaduan

Dewan Pengawas FACTS mewajibkan kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah untuk bertanggung jawab menerima pengaduan yang menyatakan pelanggaran kebijakan ini. Semua karyawan sekolah diwajibkan melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan ini kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Semua anggota komunitas sekolah lainnya, termasuk siswa, orang tua, sukarelawan, dan pengunjung, didorong untuk melaporkan tindakan apa pun yang mungkin merupakan pelanggaran kebijakan ini. Laporan dapat dibuat secara anonim, tetapi tindakan disipliner formal tidak boleh hanya didasarkan pada laporan anonim.

Dewan Pengawas FACTS mewajibkan kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah untuk bertanggung jawab menentukan apakah suatu tindakan yang diduga merupakan pelanggaran kebijakan ini. Dalam melakukannya, kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah harus melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan menyeluruh atas setiap dugaan insiden. Investigasi harus diselesaikan dalam waktu tiga hari sekolah setelah laporan atau pengaduan dibuat. Dewan melarang tindakan pembalasan atau pembalasan terhadap siapa pun yang melaporkan tindakan perundungan. Konsekuensi dan tindakan perbaikan yang tepat bagi seseorang yang melakukan tindakan pembalasan atau pembalasan akan ditentukan oleh administrator setelah mempertimbangkan sifat, tingkat keparahan, dan keadaan tindakan tersebut.

Dewan Pembina FACTS melarang siapa pun menuduh orang lain secara keliru sebagai sarana perundungan. Konsekuensi dan tindakan pemulihan yang tepat bagi seseorang yang terbukti telah menuduh orang lain secara keliru sebagai sarana perundungan dapat berkisar dari intervensi perilaku positif hingga dan termasuk skorsing atau pengusiran.

Sosialisasi dan Edukasi

Dewan mewajibkan pejabat sekolah untuk mensosialisasikan kebijakan ini setiap tahun kepada seluruh staf sekolah, siswa, dan orang tua, disertai pernyataan yang menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, di acara yang disponsori sekolah, atau di dalam bus sekolah. Kepala Sekolah & Direktur Eksekutif harus menyusun proses tahunan untuk membahas kebijakan distrik sekolah tentang perundungan dengan siswa dan staf. Sekolah harus memasukkan informasi mengenai kebijakan anti perundungan ke dalam program pelatihan dan buku panduan karyawan sekolah.

Kebijakan Anti-Pelecehan

Diadopsi 10 Agustus 2005
Diubah 19 Agustus 2009
Ditegaskan 21 Agustus 2019
Direvisi 21 Desember 2022

Sekolah Seni Rakyat dan Khazanah Budaya berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja dan pendidikan yang aman dan suportif bagi seluruh karyawan dan siswa, di mana semua anggota komunitas sekolah diperlakukan dengan hormat. Pelecehan merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar hukum serta perilaku tidak sopan yang tidak akan ditoleransi. Sekolah Seni Rakyat dan Khazanah Budaya wajib menyediakan lingkungan yang bebas dari pelecehan bagi karyawan dan siswa.

Untuk tujuan kebijakan ini, karyawan mencakup setiap orang yang dipekerjakan secara langsung atau melalui kontrak dengan perusahaan lain oleh sekolah, anggota dewan sekolah, dan setiap calon guru, peserta magang, sukarelawan sekolah, atau mahasiswa program kerja sama. Komunitas sekolah mencakup, tetapi tidak terbatas pada, seluruh siswa, karyawan sekolah, kontraktor, sukarelawan tidak dibayar, mahasiswa program kerja sama, peserta magang, calon guru, dan pengunjung.

Pelecehan berarti pelecehan yang melanggar hukum dan merupakan bentuk diskriminasi. Pelecehan dapat mencakup segala bentuk perilaku verbal, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang menyinggung, merendahkan, atau merendahkan seseorang karena perilaku verbal atau fisik tersebut berdasarkan ras, agama (keyakinan), warna kulit, asal kebangsaan, status perkawinan, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau penampilan gender, usia, keturunan, tempat lahir, atau disabilitas karyawan atau siswa yang sebenarnya atau yang dipersepsikan, yang memiliki tujuan atau dampak yang secara substansial mengganggu pekerjaan atau pendidikan karyawan atau siswa tersebut atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

Kebijakan ini berlaku untuk perilaku secara langsung maupun online.

CONTOH

Pelecehan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, contoh-contoh yang dikutip dalam kebijakan ini, dan tercantum di bawah ini.

Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada, sentuhan yang tidak diinginkan, lelucon atau gambar kasar, diskusi tentang pengalaman seksual, godaan terkait karakteristik seksual, tekanan untuk melakukan aktivitas seksual baik secara tertulis, lisan, maupun melalui gerakan fisik, menampilkan atau mengirimkan gambar atau objek pornografi, grafiti cabul, dan menyebarkan rumor terkait dugaan aktivitas seksual seseorang.

Pelecehan Ras dan Warna Kulit

Pelecehan ras atau warna kulit mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku verbal, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik ras atau warna kulit seseorang seperti nama panggilan yang menekankan stereotip, hinaan rasial, komentar tentang cara berbicara, dan referensi negatif terhadap adat istiadat ras.

Pelecehan Agama atau Kepercayaan

Pelecehan atas dasar agama atau kepercayaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku verbal, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik agama atau

kepercayaan seseorang seperti komentar yang merendahkan nama keluarga, tradisi keagamaan, atau pakaian keagamaan, atau hinaan atau grafiti keagamaan.

Pelecehan Berdasarkan Asal Kebangsaan

Pelecehan berdasarkan asal kebangsaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku lisan, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik asal kebangsaan seseorang seperti komentar negatif mengenai nama keluarga, cara berbicara, adat istiadat, bahasa, atau hinaan etnis.

Pelecehan Berdasarkan Status Perkawinan

Pelecehan berdasarkan status perkawinan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku lisan, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik status perkawinan seseorang, seperti komentar mengenai kehamilan atau menjadi orang tua yang tidak menikah.

Pelecehan Berdasarkan Orientasi Seksual

Pelecehan berdasarkan orientasi seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku lisan, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik orientasi seksual seseorang atau orientasi seksual yang dipersepsikan seperti hinaan dan perilaku meniru.

Pelecehan Identitas atau Ekspresi Gender

Pelecehan atas dasar identitas atau ekspresi gender mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku verbal, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik ekspresi atau identitas gender seseorang seperti makian, komentar mengenai genderisasi pilihan pakaian, penolakan akses ke akomodasi publik berdasarkan identitas gender seseorang, dan penggunaan nama dan kata ganti yang tidak disukai secara sengaja.

Pelecehan Disabilitas

Pelecehan atas dasar kondisi mental atau fisik disabilitas seseorang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku verbal, tertulis, atau fisik yang tidak diinginkan yang ditujukan pada karakteristik kondisi disabilitas seseorang seperti meniru cara bicara atau gerakan, penggunaan istilah atau cercaan yang merendahkan, menantang atau meremehkan penggunaan akomodasi yang menjadi hak individu disabilitas, mengganggu peralatan yang diperlukan, atau penolakan akses ke aktivitas berdasarkan disabilitas seseorang.

PELAPORAN

1. **Wajib:** Kebijakan tegas Sekolah Seni Rakyat-Harta Budaya adalah mendorong karyawan atau siswa yang menjadi korban pelecehan untuk melaporkan insiden pelecehan. Metode pelaporan mencakup platform pelaporan eksternal seperti Safe2Say Something, saluran informasi anonim yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung Pennsylvania. Karyawan yang menyaksikan insiden pelecehan diwajibkan untuk segera melaporkan insiden tersebut kepada atasan langsung mereka atau administrator lain yang bukan subjek pengaduan, sebagaimana mestinya dalam situasi tersebut.
2. **Privasi:** Pengaduan akan dijaga kerahasiaannya semaksimal mungkin mengingat kebutuhan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti hasil investigasi.
3. **Pembalasan:** Tidak akan ada tindakan merugikan yang diambil terhadap seseorang yang mengajukan pengaduan pelecehan ketika pelapor dengan jujur meyakini pelecehan telah terjadi atau sedang terjadi, atau karena berpartisipasi dalam atau bekerja sama dalam investigasi. Setiap individu yang melakukan pembalasan terhadap karyawan atau siswa yang melaporkan, bersaksi, membantu, atau berpartisipasi dalam investigasi atau sidang terkait pengaduan pelecehan akan dikenakan sanksi oleh sekolah.

4. Tindakan Merugikan mencakup segala bentuk intimidasi, pembalasan, atau pelecehan seperti penurunan nilai, skorsing, pengusiran, perubahan kondisi pendidikan, hilangnya hak istimewa atau tunjangan, atau tindakan disipliner lain yang tidak sah dalam kasus siswa, dan mencakup segala bentuk intimidasi, pembalasan, atau pelecehan seperti skorsing, pemutusan hubungan kerja, perubahan kondisi kerja, hilangnya hak istimewa atau tunjangan, atau tindakan disipliner lain dalam kasus karyawan.

TANGGUNG JAWAB DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

1. Pelaporan: Karyawan yang menerima pengaduan pelecehan harus segera memberitahu Kepala Sekolah (atau yang ditunjuk) atau administrator lain yang bukan subjek pengaduan.
2. Investigasi: Sekolah bertanggung jawab untuk menindaklanjuti informasi apapun terkait pelecehan yang diketahuinya. Kepala Sekolah atau Direktur Eksekutif harus menyediakan investigasi yang menyeluruh dan segera atas insiden tersebut; investigasi dan laporan tertulis harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan prosedur sekolah setelah laporan atau pengaduan, formal maupun informal, tertulis maupun lisan, diterima. Tidak seorang pun yang menjadi subjek pengaduan boleh melakukan investigasi semacam itu.
3. Tindakan Akhir atas Pengaduan: Sekolah akan mengambil tindakan disipliner atau remedial yang sesuai untuk memastikan tidak terjadi pelecehan lebih lanjut. Tindakan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pendidikan, pelatihan, konseling, pemindahan, penangguhan, dan/atau pengeluaran siswa, serta pendidikan, pelatihan, konseling, pemindahan, penangguhan, dan/atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.
4. Pengaduan Palsu: Setiap orang yang dengan sengaja membuat tuduhan palsu terkait pelecehan akan dikenakan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemecatan karyawan, atau penangguhan dan pengeluaran siswa.
5. Banding: Seseorang yang dinilai melanggar kebijakan ini dan dikenakan tindakan berdasarkan kebijakan ini dapat mengajukan banding atas penetapan dan/atau tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang diadopsi dalam kebijakan ini. Prosedur tersebut harus konsisten dengan ketentuan perjanjian kerja bersama yang berlaku.
6. Sosialisasi: Kepala Sekolah dan Direktur Eksekutif wajib menggunakan segala cara yang wajar untuk menginformasikan kepada siswa, karyawan, dan masyarakat bahwa sekolah tidak akan menoleransi pelecehan. Salinan kebijakan ini wajib diberikan kepada siswa, staf, dan orang tua setiap tahun dan wajib disertakan dalam materi yang disosialisasikan kepada sekolah dan masyarakat.
7. Pelatihan: Kepala Sekolah atau yang ditunjuk wajib mengembangkan metode yang sesuai dengan usia untuk membahas makna dan substansi kebijakan ini dengan staf dan siswa guna membantu mencegah pelecehan. Pelatihan dapat dilaksanakan dalam konteks pengembangan profesional karyawan dan kurikulum sekolah untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman yang luas di antara seluruh anggota komunitas sekolah.